

## Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara)

Chynthia Angelina  
Medan , Indonesia  
[chynthiaangelinaa@gmail.com](mailto:chynthiaangelinaa@gmail.com)

Janice  
Medan , Indonesia  
[janiceyangg@hotmail.com](mailto:janiceyangg@hotmail.com)

Christalia Clarina  
Medan , Indonesia  
[Christaliaclarina5@gmail.com](mailto:Christaliaclarina5@gmail.com)

Wina Wira Fanjaya  
Medan, Indonesia  
[Fanjayawinawira@gmail.com](mailto:Fanjayawinawira@gmail.com)

Jesisca  
Medan , Indonesia  
[Jessicajes18@gmail.com](mailto:Jessicajes18@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Analisis data untuk penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sementara itu Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

### I. PENDAHULUAN

Sejak berlakunya undang-undang tentang otonomi daerah di Indonesia, masing-masing daerah diberikan kewenangan besar dalam mengelola pemerintahan termasuk juga dalam pengelolaan keuangan masing-masing daerah tersebut. Semangat dari otonomi daerah ini juga diberikan agar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, salah satunya adalah keleluasaan mencari sumber-sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran daerah itu sendiri.

Dikutip dari (Simorangkir, 2017),

Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pengalokasian APBN ke daerah tidak mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga anggaran yang dikirimkan ke daerah di setiap tahun makin meningkat. Mulai dari peluncuran program fiskal pada tahun 2000 sebesar Rp.81 triliun hingga saat ini telah mencapai Rp.766 triliun, dan alokasi anggaran belanja juga mengalami kenaikan sebesar 12 kali lipat dengan jumlah Rp.93 triliun hingga mencapai Rp.1.097 triliun. Artinya kenaikan belanja APBN dan kiriman anggaran ke daerah-daerah tidak

mengikuti pengelolaan yang efektif dan efisien. Negara harus segera membuat transformasi pengelolaan keuangan negara karena pengelolaan APBN dan APBD masih memiliki waktu untuk diperbaiki sehingga dapat lebih tepat dan benar. Hal ini terjadi karena meningkatnya belanja pegawai lebih tinggi dari limit belanja modal, simpanan pada bank yang makin meningkat setiap tahunnya dan peningkatan layanan publik negara. Contohnya di Balikpapan memiliki akses air bersih sebesar 98% sedangkan di Papua hanya terdapat 4% saja, di Aceh hanya mendapat 15 banding 100 ribu orang tenaga kesehatan dan di Kupang hanya 1,4 banding 100 ribu orang yang dilayani tenaga kesehatan. Lebih buruknya lagi terdapat 361 dari 542 kepada daerah yang terlibat kasus korupsi, diantaranya terdapat 18 gubernur, 343 bupati/walikota, jaringan korupsi terbesar yaitu pada pengadaan konstruksi bangunan.

Setelah dijalkannya undang-undang otonomi daerah selama 16 tahun, ternyata masih banyak daerah yang belum mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah daerah mengharapkan dana yang seimbang untuk membantu keuangan daerah karena kondisi keuangan daerah yang sangat bergantung dengan dana bantuan keuangan pusat. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah dana transfer bke daerah sebagai bagian dari bantuan keuangan pusat ke daerah mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peningkatan ini memang bisa saja diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja di daerah, tetapi jika dilihat dari semangat awal otonomi daerah, ketergantungan daerah kepada pusat sampai saat ini dalam hal pendanaan belanja daerah tidak lagi menjadi tujuan utama otonomi daerah.

Alokasi belanja modal di daerah akan dipengaruhi kenaikan ekonomi suatu daerah, jika kenaikan ekonomi stabil maka daya beli masyarakat juga baik sehingga pendapatan dari sektor pajak daerah ataupun retribusi daerah akan jauh lebih baik. Kenaikan ekonomi yang baik di suatu daerah akan menarik investor untuk menginvestasikan dananya yang akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pajak dan retribusi serta perputaran modal di daerah tersebut yang akan menyebabkan *multiplier effect* terhadap ekonomi di daerah tersebut. Untuk itu setiap pemerintah daerah harus menjaga stabilitas

ekonomi di daerahnya agar tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat yang akan berakibat terhadap ekonomi di daerah tersebut.

Efek ganda yang disebabkan ekonomi yang meningkat akan menyebabkan masyarakat menggunakan penghasilan yang ada untuk belanja kepada pelaku-pelaku usaha dan dari belanja tersebut akan dikenakan pajak daerah, retribusi daerah dan bentuk-bentuk penghasilan lain yang dirasakan oleh masyarakat. Pendapatan asli di daerah merupakan pendapatan murni dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dipenuhi daerah akan leluasa dalam mengelola belanja. Pendapatan daerah salah satu cara pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan fiskal di daerah. Pendapatan daerah yang tinggi dapat menghindari ketergantungan daerah terhadap pusat melalui bantuan-bantuan keuangan pemerintah kota.

Salah satu bantuan keuangan pemerintah pusat ke daerah atau sering disebut dana keseimbangan adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum diberikan kepada daerah untuk mengatasi ketimpangan urusan pajak di daerah, agar daerah yang mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi dapat mensubsidi daerah yang pendapatan daerahnya rendah. Dana alokasi umum digunakan untuk belanja umum di daerah seperti belanja pegawai. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana alokasi umum dari pusat sampai sekarang masih sangat tinggi, sehingga pemerintah pusat mencari formula yang tepat dalam menghitung kebutuhan dana alokasi umum untuk daerah, agar tidak ada lagi daerah yang tidak maksimal dalam mencapai target pendapatan asli daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah secara khusus mengelola belanja, pemerintah daerah dalam mengelola belanja sering tidak efisien dan tidak efektif, sasaran belanja yang tidak terukur dan outcome yang tidak tercapai. Pengelolaan belanja yang tidak efisien dan efektif tersebut seringkali menyisakan banyak anggaran di akhir tahun. Perhitungan jumlah belanja yang tidak tepat, adanya *markup* harga, penyelesaian pekerjaan di akhir tahun yang tidak selesai atau bahkan penyusunan anggaran yang tidak berbasis kinerja menyebabkan anggaran yang berlebih di akhir tahun. Anggaran ini dapat bermanfaat untuk tahun anggaran tahun selanjutnya tetapi dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dianggarkan terlebih dahulu dalam akun belanja pembiayaan, tetapi APBD sering digunakan untuk keperluan pegawai dibandingkan belanja modal yang merupakan pembelanjaan yang dapat dialokasikan kepada masyarakat. SiLPA yang banyak juga mengindikasikan pengelolaan anggaran yang tidak baik dari pemerintah daerah tersebut, karena anggaran telah diatur sesuai kebutuhan pemerintah daerah untuk tahun anggaran tersebut. Hal ini juga berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak tercapai.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Dengan semakin banyaknya sumber dana yang dihasilkan oleh daerah-daerah, dengan ini dapat meningkatnya penghasilan dari daerah-daerah yang seharusnya mengikuti kenaikan pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi semakin berkembang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun daerah yang diberikan dalam berbagai bentuk untuk keperluan masyarakat. (Wertanti & A.A.N.B, 2013)

H<sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal

Teori Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal terbukti bahwa perubahan dalam pendapatan daerah yang mengakibatkan perubahan belanja modal. (Juniawan & Suryantini, 2018)

H<sub>2</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Teori Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dengan adanya dana alokasi umum, maka biaya belanja modal akan semakin tinggi. Dana alokasi umum akan memenuhi kebutuhan dasar layanan umum, sehingga pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi (dana) dengan jumlah yang besar terhadap penambahan belanja modal.

(Ningsasra, 2016)

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Teori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal

SiLPA yang dikenal sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran harus lebih mahir dalam meningkatkan pengadaan berbagai prasarana dan sarana yang dilakukan untuk kepentingan publik. SiLPA memiliki indikator yang membayangkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan akan terbentuk jika terjadi kelebihan pada APBD. Jika biaya neto positif, maka pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. (Kusumawardani, 2018)

H<sub>4</sub> : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif sebagai pendekatan penelitian. Kuantitatif diartikan sebagai landasan filsafat *positivisme*, yang bertujuan untuk meneliti populasi dan sampel, data-data yang bersifat *statistic* yang dapat menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif diartikan sebagai penelitian yang bukan membandingkan satu variabel dengan sampel melainkan mencari hubungan antar variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2012)

### 3.2. Populasi

Populasi merupakan objek dan subjek yang terdapat kualitas dan karakteristik yang telah disusun oleh peneliti dan dipelajari untuk disimpulkan (Sugiyono, 2012). Populasi yang akan diambil oleh peneliti yakni data tahunan yang terdapat pada tahun 2014-2017 dengan mengambil laporan keuangan APBD sejumlah 33 Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

### 3.3. Sampel

Sampel merupakan total jumlah yang diambil dari populasi yang menggunakan teknik sampel jenuh. Sugiyono (2012), sampel

jenuh digunakan sebagai penentuan sampel yang sudah di tentukan dalam populasi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 33 Kota / Kabupaten dengan perhitungan 33 x 4 periode (laporan tahunan) sehingga diperoleh sebanyak 132 data.

### 3.4 Identifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat variabel 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>), Pendapatan Asli Daerah (X<sub>2</sub>), Dana Alokasi Umum (X<sub>3</sub>) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X<sub>4</sub>).

### Teknik Analisis Data

Analisis statistik untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu

melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan uji normalitas data, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji secara simultan (F) dan uji secara parsial (t).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini berjumlah 33 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara dimana selama 4 periode yaitu pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dengan jumlah data penelitian sebanyak 132 data. Berikut hasil olah data dari sampel dilihat dari statistik deskriptif yaitu:

**Tabel 3.1 STATISTIK DESKRIPTIF  
Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	132	4.11	7.67	5.2850	.55534
PAD	132	10298059000	1739756924000	128854383717.54	270795434464.637
DAU	132	250589805000	1611940995000	618239734080.01	287646845992.010
SILPA	132	-64357000	376281581501	87741801629.97	66748236983.589
BM	132	45065315458	997475993000	246097268803.50	157052497288.845
Valid N (listwise)	132				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2019

Nilai min Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 4,11 yang diperoleh Kabupaten Batubara pada tahun 2015 dan tahun 2017. Nilai maks Pertumbuhan Ekonomi memperoleh nilai 7,67 yang diperoleh Kabupaten Deli Serdang di tahun 2014. Nilai keseluruhan Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah 5,2850. Nilai standar deviasi Pertumbuhan Ekonomi adalah 0,55534.

Nilai min Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp10.298.059.000 yang diperoleh Kabupaten Nias Barat di tahun 2014. Nilai maks Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp1.739.756.924.000 yang diperoleh Kota Medan pada tahun 2017. Nilai keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-

2017 adalah Rp128.854.383.717,54. Nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah adalah Rp270.795.434.464,637.

Nilai min Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp250.589.805.000 yang diperoleh Kabupaten Nias di tahun 2016. Nilai maks Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp1.611.940.995.000 yang diperoleh Kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhan Dana Alokasi Umum Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah Rp618.239.734.080,01. Nilai standar deviasi Dana Alokasi Umum adalah Rp287.646.845.992,010.

Nilai min Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar minus Rp64.357.000 yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan di

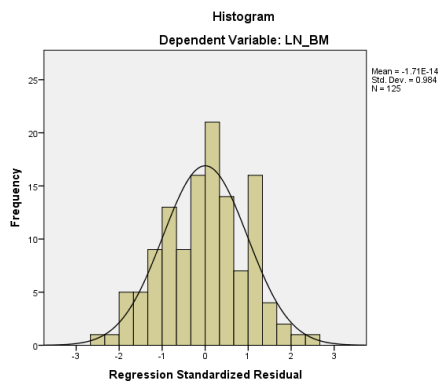
tahun 2016. Nilai maks Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sebesar Rp376.281.581.501 yang diperoleh kota Medan di tahun 2015. Nilai keseluruhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah Rp87.741.801.629,97. Nilai standar deviasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah Rp66.748.236.983,589.

Nilai min Belanja Modal adalah sebesar Rp45.065.315.458 yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan di tahun 2016. Nilai maks Belanja Modal adalah sebesar Rp997.475.993.000 yang diperoleh kota Medan di tahun 2017. Nilai rata-rata Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tahun 2014-2017 adalah Rp246.097.268.803,50. Nilai standar deviasi Belanja Modal adalah Rp157.052.497.288,845.

4.2. Uji Asumsi Klasik  
Uji Normalitas

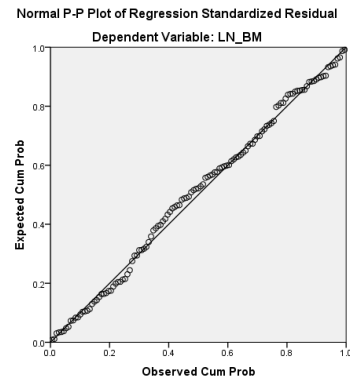
Dalam uji ini bertujuan untuk menguji apakah variable pengganggu memiliki distribusi normal, uji yang digunakan adalah analisis grafik dan analisis statistik.

Analisis Grafik



**Gambar 3.1 Uji Normalitas Histogram Setelah Transformasi**

Berdasarkan Gambar III.1, hasil residual data telah menunjukkan residual data telah menunjukkan data berdistribusi normal karena kurva normal membentuk lonceng sempurna serta sebagian besar data telah berada di dalam kurva normal.



**Gambar 3.2 Uji Normalitas P-P Plot Setelah Transformasi**

Berdasarkan Gambar III.2, hasilnya menyerupai titik-titik yang mendekati garis diagonal sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. Untuk itu harus melakukan analisis secara statistic untuk mengetahui apakah data tersebut benar-benar telah bersifat normal.

4.3. Analisis Statistik

Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametik *Kolmogrov-smirnov* (K-S). Dimana apabila nilai signifikan >0,05 berarti data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikan <0,05 berarti tidak normal.

**Tabel 3.2 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov Setelah Tranformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.29410290
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.045
	Negative	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.502
Asymp. Sig. (2-tailed)		.962

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Berdasarkan Tabel III.2, hasilnya menunjukkan nilai signifikan 0,962 > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hasil Kolmogorov Smirnov telah berdistribusi normal.



**Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari Uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Jika model regresi tersebut bagus maka tidak akan terjadi korelasi antar variabel independen. Uji ini dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen.

**Tabel 3.3**  
**Uji Multikolinearitas Setelah transformasi Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_PE	1.000	1.000
	LN_PAD	.376	2.663
	LN_DAU	.363	2.757
	LN_SILPA	.919	1.088

a. Dependent Variable : LN\_BM

Nilai *tolerance* untuk variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 1,000, PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,376, DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 0,363 dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar 0,919 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih besar 0,10 sedangkan nilai VIF variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi) sebesar 1,000, PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 2,663, DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 2,757, SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Daerah) sebesar 1,088 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF berada di bawah atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian hasil uji multikolinearitas tidak terjadi regresi antar variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

**Uji Autokolerasi**

Pada penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji *Durbin-Watson*. Ada 5 keputusan dalam pengambilan keputusan *Durbin-Watson*:

1. Jika  $0 < d < dl$ , maka terdapat autokorelasi positif
2. Jika  $dl \leq d \leq du$ , maka tidak dapat diambil kesimpulan terdapat autokorelasi positif
3. Jika  $4-dl \leq d \leq 4-dl$ , maka terdapat autokorelasi negative
4. Jika  $4-du \leq d \leq 4-dl$ , maka tidak dapat diambil kesimpulan terdapat autokorelasi

negatif

5. Jika  $du < d < 4-du$ , maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif (Ghozali, 2009)

Tabel 3.4

**Model Summary<sup>b</sup>**

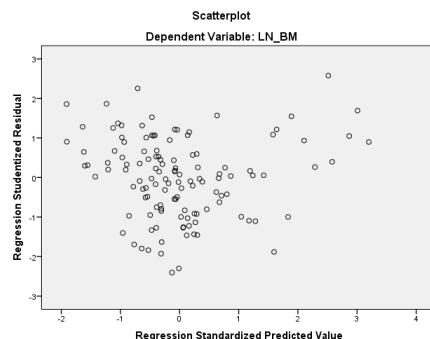
Model	Durbin-Watson
1	2.113

- a. Predictors: (Constant), LN\_SILPA, LN\_PE, LN\_PAD, LN\_DAU
- b. Dependent Variable: LN\_BM

Hasil uji *Durbin-Watson* menunjukkan nilai sebesar 2,113; sedangkan dalam tabel DW untuk "k"<sup>2</sup>=4 (variabel bebas, tidak termasuk variabel terikat) dan N=132 bernilai dl (batas bawah) = 1,6539 dan du (batas atas) = 1,7786; 4-dl = 2,3461 dan 4-du = 2,2214. Dengan melihat kriteria pada pedoman *Durbin-Watson* maka nilai  $du < dw < 4-du$  atau  $1,7786 < 2,113 < 2,2214$ . Dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif.

**Uji Heteroskedastisitas**

Data yang bagus dan normal tidak akan mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengukut apakah data tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan varian *error terms*. Dalam penelitian ini digunakan metode *chart (Diagram Scatterplot)* yang jika titik-titik membentuk sebuah pola maka terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika titik-titik membuat sebuah pola yang menyebar diatas dan di bawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar III.3 Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi**

Berdasarkan Gambar III.3, hasilnya terlihat bahwa titik-titik menyebar acak tersebar baik di atas maupun dibawah nol (0) pada sumbu Y, tidak terkumpul disatu tempat, sehingga pada grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi Heteroskedastisitas.

**Tabel III.5 Uji Glejser setelah tranformasi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.816	1.330		.614	.541
LN_PE	-.004	.157	-.003	-.028	.977
LN_PAD	.038	.029	.197	1.345	.181
LN_DAU	-.029	.067	-.065	-.436	.663
LN_SILPA	-.030	.023	-.123	1.307	.194

a. Dependent Variable: ABS\_RES2  
Hasil Uji Glejser pada tabel

III.5 diatas menunjukkan nilai signifikan dari variabel independen PE (Pertumbuhan Ekonomi) sejumlah 0,977 lebih besar 0,05 , PAD (Pendapatan Asli Daerah) sejumlah 0,181 lebih besar 0,05 , DAU (Dana Alokasi Umum) sejumlah 0,663 lebih besar 0,05 dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sejumlah 0,194 lebih besar 0,05. Dengan demikian dari hasil uji glejser dapat diambil kesimpulan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data Penelitian Metode Penelitian

Pengujian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi yang digunakan adalah:

**Tabel 3.6 Persamaan Regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	62805422404.511	56461921482.994		1.112	.268
Pertumbuhan Ekonomi	331445040.727	10312874942.168	.001	.032	.974
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	.310	.091	.132	3.400	.001
Pendapatan Asli Daerah	.343	.030	.592	11.325	.000
Dana Alokasi Umum	.178	.029	.326	6.198	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Belanja Modal = 62805422404.511 + 331445040.727 Pertumbuhan Ekonomi + 0,310 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran + 0,343 Pendapatan Asli Daerah + 0,178 Dana Alokasi Umum

1. Nilai Konstanta (a) = 62805422404.511  
Nilai (a) menunjukkan apabila variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah bernilai konsta, maka nilai Dana Alokasi Umum sebesar = 62805422404.511
2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>) = 331445040.727  
Koefisien regresi ini menunjukkan setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar satu, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 331445040.727 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.
3. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X<sub>2</sub>) = 0,310  
Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap Sisa Lebih Anggaran sebesar satu, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 0,310 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>3</sub>) = 0,343

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah sebesar satu, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 0,343 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.

5. Variabel Dana Alokasi Umum (X<sub>4</sub>) = 0,178  
Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap Dana Alokasi Umum sebesar satu, maka Belanja Modal mengalami kenaikan sejumlah 0,178 dengan perkiraan variabel lain dianggap tetap.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan untuk menerangkan variabel dependen (Y). Jika koefisien determinasi mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel independen (X) lebih besar terhadap variabel dependen (Y).

**Tabel 3.7 Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.916 <sup>a</sup>	.840	.834	63893857934.04992	2.249

- a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah  
b. Dependent Variable : Belanja Modal

Berdasarkan Tabel IV.7 dilihat bahwa besarnya nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa 83,4% variasi variabel Belanja Modal (Y) dapat dijelaskan oleh variabel variasi Pertumbuhan Ekonomi

**Tabel III.8 Uji F**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2712710799134928700000000.000	4	678177699783732200000000.000	166.121	.000 <sup>b</sup>
Residual	518467985375462400000000.000	127	4082425081696554000000.000		
Total	3231178784510391000000000.000	131			

- a. Dependent Variable: Belanja Modal  
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel IV.8 di atas maka disimpulkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 166,121.

Pada derajat bebas 1 ( $df_1$ ) =  $k - 1 = 4 - 1 = 3$ , dan derajat bebas 2 ( $df_2$ ) =  $n - k - 1 = 33 - 4 - 1 = 28$ , dimana ;  $n$  = jumlah sampel ,  $k$  = jumlah variabel , maka nilai  $f$  tabel pada taraf kepercayaan signifikasi 0,05 adalah 2,70.

Maka hasilnya adalah  $F_{hitung} 166,121 > F_{tabel} 2,70$  dengan tingkat signifikan 0,000. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak artinya secara bersamssn Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan

( $X_1$ ), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( $X_2$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $X_3$ ) dan Dana Alokasi Umum ( $X_4$ ) sedangkan sisanya sebesar (100% - 83,4% = 16,6%) merupakan variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel *independen* yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen*.

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Uji ini menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh satu variabel *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen*.

**Tabel 3.9**  
Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	62805422404.511	56461921482.994		1.112	.268
	Pertumbuhan Ekonomi	331445040.727	10312874942.168	.001	.032	.974
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	.310	.091	.132	3.400	.001
	Pendapatan Asli Daerah	.343	.030	.592	11.325	.000
	Dana Alokasi Umum	.178	.029	.326	6.198	.000

- a. Dependent Variable: Belanja Modal

Nilai  $t$  tabel untuk belanja modal 0,05 pada derajat bebas  $n = 33$  adalah 2,03452. Dengan

demikian hasil dari Uji  $t$  dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung Pertumbuhan Ekonomi 0,032 < t tabel 2,03452 dengan nilai 0,974 > 0,05 maka  $H_0$  diterima artinya Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3,400 > t tabel 2,03452 dengan nilai 0,001 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak artinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
3. Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah 11,325 > t tabel 2,03452 dengan nilai 0,000 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.
4. Hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t hitung Dana Alokasi Umum 6,198 > t tabel 2,03452 dengan nilai 0,000 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Studi Kasus pada Pemerintah Kota / Kabupaten di Sumatera Utara.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Nova, 2017) , dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus mengubah komposisi belanjanya, karena selama ini kurang produktif dalam belanja rutinnnya,

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Engkos, 2017) dan (Mahmudi, 2010), bahwa “apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran tersebut tidak akan hangus, tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun anggaran berikutnya yang masuk dalam SiLPA”

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

terhadap Belanja Modal, karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saptaningsih, 2009), karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian dihasilkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan pendapat (Pradita, 2013), yang mengemukakan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi belanja modal yang akan dibelanjakan.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Kesimpulan yang kami peroleh adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal
3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
4. Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal

##### Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Dari hasil penelitian ini terdapat 1 variabel yang tidak berpengaruh yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Bagi pemerintah kota dan kabupaten, agar terus meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah karena pengaruhnya sangat mempengaruhi Belanja Modal. Bagi akademisi untuk menambah variabel lain dalam melakukan penelitian yang sejenis atau menggunakan variabel moderasi.

##### Daftar Pustaka

- Engkos, K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. *Jurnal Universitas Galuh Ciamis*, 13-32.

- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud*, 1255-1281.
- Kusumawardani, I. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DAK, SILPA dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2010-2015. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ningsasra, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Kab/Kota Sumatera bagian Tengah tahun 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Nova, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Pradita, R. R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Saptaningsih, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. *Akmenipa UPY*.
- Simorangkir, E. (2017, November 22). *detik finance*. Retrieved November 22, 2017, from detikcom: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3737927/kemenkeu-pengelolaan-anggaran-di-daerah-belum-efektif>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wertanti, I. G., & A.A.N.B, D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai model moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 567-584.